

Peran DPR Dalam Implementasi Menuju Spirit Bonus Demografi Indonesia Emas 2045

Rabella Zahra Zetira¹, Putri Apriliani Pratiw², Nur Izati Kirom³, Fauzan Wahyu Akbar⁴, Muhammad Aqil Qenedi⁵

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Korespondensi : rabellazz07@gmail.com

ABSTRACT

As a government institution named “Informative” in 2021, the Secretariat General of the DPR RI provides information services to the public based on digital technology. Indonesia is projected to reach the peak of the demographic bonus in 2045, which provides a great opportunity to encourage economic growth and national development. In this context, the People’s Representative Council (DPR) has a strategic role in supporting the implementation of policies that optimize the potential of human resources towards a Golden Indonesia 2045. This research aims to analyze the contribution of the DPR in designing regulations, supervision and budgeting that are relevant to managing the demographic bonus. The focus of the discussion includes the role of the DPR in supporting education, health, employment and improving the quality of life of the community. The results of the study show that the active involvement of the DPR is very necessary to ensure inclusive and sustainable policies, so that they can encourage the achievement of the vision of a Golden Indonesia 2045. This research uses a qualitative descriptive method. Data was taken through in-depth interviews with sources regarding the publication of DPR RI minutes and literature reviews. This research also highlights the challenges faced by the DPR and provides strategic recommendations to strengthen its role in realizing the spirit of demographic bonus.

Keywords : DPR in Implementation, Law, Demographic Bonus

ABSTRAK

Sebagai lembaga pemerintah yang diberi nama “Informatif” pada tahun 2021, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat berbasis teknologi digital. Indonesia diproyeksikan akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2045, yang memberikan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan yang mengoptimalkan potensi sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi DPR dalam merancang regulasi, pengawasan, dan penganggaran yang relevan dengan pengelolaan bonus demografi. Fokus pembahasan meliputi peran DPR dalam mendukung pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif DPR sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif. Data diambil melalui wawancara mendalam dengan narasumber terkait publikasi risalah DPR RI dan tinjauan pustaka, Penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi DPR serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat perannya dalam mewujudkan spirit bonus demografi.

Kata Kunci: DPR dalam Implementasi, Hukum, Bonus Demografi

PENDAHULUAN

Pendahuluan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam implementasi menuju spirit bonus demografi Indonesia Emas 2045 sangat penting, mengingat Indonesia akan mengalami lonjakan jumlah penduduk produktif pada tahun-tahun mendatang. Bonus demografi mengacu pada periode ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar daripada jumlah penduduk yang tidak produktif (anak-anak dan lansia). Fenomena ini memberikan peluang besar bagi negara untuk memanfaatkan potensi tenaga kerja yang melimpah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga menghadirkan tantangan besar dalam hal pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan kualitas hidup.

DPR memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui berbagai kebijakan yang dapat mendukung pencapaian target tersebut. DPR bertanggung jawab dalam merancang dan mengesahkan undang-undang yang mendukung penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, DPR juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, yang semuanya sangat penting dalam mempersiapkan Indonesia untuk menghadapi bonus demografi.

Dengan demikian, peran DPR dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan sangatlah krusial untuk memastikan Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi sebagai kekuatan ekonomi yang berdaya saing tinggi pada tahun 2045. (Sriyanti dmuharam R et al., 2021).

Bonus demografi adalah suatu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak produktif (usia muda dan usia lanjut). Indonesia diprediksi akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2045, yang berpotensi menjadi peluang besar untuk mendorong kemajuan ekonomi dan sosial negara. Namun, untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal, dibutuhkan perencanaan dan kebijakan yang matang serta implementasi yang tepat.

Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang sangat penting. Sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, DPRD memiliki kewenangan untuk menyusun, mengesahkan, dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045. Peran DPRD sangat vital dalam memastikan bahwa berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dapat sejalan dengan upaya nasional untuk memanfaatkan bonus demografi.

DPRD perlu mendukung kebijakan yang berfokus pada pendidikan, pelatihan keterampilan, penyediaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan sektor ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup generasi muda. Selain itu, DPRD juga harus aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan yang berkaitan dengan penguatan infrastruktur, kesehatan, dan sektor sosial-ekonomi yang dapat mempersiapkan Indonesia menghadapi masa depan yang lebih baik pada tahun 2045.

Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi bonus demografi untuk mencapai tujuan besar menuju Indonesia Emas 2045, dengan generasi muda yang produktif, berpendidikan, dan siap menghadapi tantangan global.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Penelitian ini dilakukan dengan cara Tinjauan pustaka, adapun sumber yang digunakan adalah pengumpulan data yang telah melakukan penelitian pada penelitian ini. Yang juga menggunakan data sekunder dari artikel, jurnal dengan pendekatan kepustakaan referensi. Secara keseluruhan, metode Penelitian ini berfokus pada Peran DPR dalam menuju Bonus Demografi 2045 Hasil dari pengumpulan bahan-bahan hukum yang didapat kemudian diuraikan kedalam kalimat yang teratur, logis dan efektif agar dapat memudahkan pemahaman data guna menjawab Hasil dan Pembahasan Permasalahan-Permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peran DPRD dalam merumuskan kebijakan strategis untuk memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045

Peran DPRD dalam Implementasi Menuju Spirit Bonus Demografi Indonesia Emas 2045 dapat mencakup beberapa aspek yang mencerminkan kontribusi dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mendorong pencapaian Indonesia Emas 2045, khususnya dalam memanfaatkan bonus demografi yang diprediksi akan terjadi di Indonesia pada tahun-tahun mendatang.

Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, yang merupakan visi Indonesia menuju negara maju pada usia 100 tahun kemerdekaannya, pemanfaatan bonus demografi menjadi kunci utama. Bonus demografi adalah kondisi di mana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Indonesia diperkirakan akan mencapai puncak bonus demografi pada sekitar tahun 2030-an. (Ade, 2017)

Dalam konteks ini, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) memainkan peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan yang dapat mengoptimalkan potensi bonus demografi tersebut.

Berikut adalah beberapa sub bahasan mengenai peran DPR dalam implementasi menuju spirit bonus demografi Indonesia Emas 2045:

1. Peran DPR dalam Penyusunan Kebijakan Pendidikan dan Keterampilan

Mengatur Kebijakan Pendidikan: DPR berperan dalam merancang undang-undang yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, terutama pendidikan vokasi dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa generasi muda Indonesia memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja.

Mendorong Pendidikan Berbasis Teknologi dan Industri 4.0: Dalam menghadapi era digital, DPR perlu mendorong kebijakan yang mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Ini termasuk memastikan kurikulum yang mengarah pada penguasaan teknologi, seperti coding, data science, dan keterampilan digital lainnya.

Mengatur Kebijakan Pendidikan: DPR berperan dalam merancang undang-undang yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, terutama pendidikan vokasi dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa generasi muda Indonesia memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja.

Mendorong Pendidikan Berbasis Teknologi dan Industri 4.0: Dalam menghadapi era digital, DPR perlu mendorong kebijakan yang mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Ini termasuk memastikan kurikulum yang mengarah pada penguasaan teknologi, seperti coding, data science, dan keterampilan digital lainnya.

Mendorong Pendidikan Berbasis Teknologi dan Industri 4.0: Dalam menghadapi era digital, DPR perlu mendorong kebijakan yang mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Ini termasuk memastikan kurikulum yang mengarah pada penguasaan teknologi, seperti coding, data science, dan keterampilan digital lainnya. (M. K. Ramadhani, 2017)

2.

Pemberdayaan Sektor UMKM: Mengingat banyaknya lapangan kerja yang diserap oleh UMKM, DPR memiliki peran dalam mengawasi program-program yang bertujuan untuk pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini dapat meliputi kebijakan kemudahan perizinan, akses pembiayaan, dan penguatan kapasitas.

Mendorong Investasi untuk Menciptakan Lapangan Kerja: DPR dapat berfungsi sebagai penggerak kebijakan yang mendorong investasi, baik domestik maupun asing, yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja bagi tenaga kerja muda. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan insentif bagi sektor-sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

3. Peran DPR dalam Meningkatkan Akses terhadap Layanan Kesehatan dan Jaminan Sosial

Membangun Sistem Kesehatan yang Inklusif: Untuk memastikan bonus demografi tidak terhambat oleh masalah kesehatan, DPR perlu mendukung kebijakan kesehatan yang menjamin akses terhadap layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan menjaga kesehatan tenaga kerja, produktivitas akan meningkat.

Reformasi Sistem Jaminan Sosial: DPR juga perlu merumuskan undang-undang yang memperkuat jaminan sosial dan pensiun, tidak hanya untuk generasi tua di masa depan, tetapi juga untuk mendukung tenaga kerja usia produktif yang memerlukan perlindungan sosial dan kesehatan.

4. Peran DPR dalam Infrastruktur dan Pembangunan Daerah

Mendorong Pemerataan Pembangunan: Dalam rangka menciptakan peluang kerja dan pengembangan SDM yang merata, DPR perlu mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan di berbagai daerah. Infrastruktur yang baik akan mempermudah mobilitas tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi ekonomi.

Mendorong Infrastruktur Digital: Infrastruktur digital juga sangat penting dalam era bonus demografi yang semakin bergantung pada teknologi. DPR harus memastikan adanya kebijakan yang mendorong pemerataan akses internet dan teknologi di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah tertinggal. (Abunawas, R., Muthalib, AA, Nur, M., & Tambunan, 2023)

5. Peran DPR dalam Legislasi yang Mendukung Inovasi dan Teknologi

Mendorong Inovasi dan Pengembangan Teknologi: Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi adalah memastikan tenaga kerja yang terampil dan siap menghadapi perkembangan teknologi. DPR dapat berperan dengan merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan inovasi dan riset teknologi yang berkelanjutan.

Menjamin Kebijakan yang Mendukung Ekonomi Digital: DPR perlu membuat regulasi yang menciptakan ekosistem yang mendukung ekonomi digital, seperti kebijakan yang mempermudah transformasi digital bagi UMKM, serta menciptakan kerangka hukum yang aman bagi industri teknologi. (Secha et al., 2019)

6. Peran DPR dalam Kolaborasi Antar Lembaga dan Stakeholder

Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Sektor Swasta: DPR harus mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta sektor swasta dalam

rangka menciptakan kebijakan yang inklusif dan efektif dalam memanfaatkan bonus demografi. Ini termasuk mendorong sektor swasta untuk ikut berperan dalam penyediaan pelatihan kerja dan pembangunan infrastruktur. Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan Lembaga Penelitian: Dalam rangka menyiapkan SDM yang berkualitas, DPR dapat mendorong kemitraan antara lembaga pendidikan dan dunia usaha untuk merancang program-program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

7. Peran DPR dalam Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat

Edukasi Tentang Kewirausahaan dan Keterampilan: DPR dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memiliki keterampilan tambahan, serta mendorong kewirausahaan sebagai alternatif penghasilan. Ini sangat penting dalam memanfaatkan bonus demografi agar tidak terjadi lonjakan pengangguran.

Penyuluhan tentang Perencanaan Karir: Menyediakan akses informasi yang cukup terkait karir dan pengembangan diri juga menjadi bagian penting. DPR dapat mendorong program-program yang mengedukasi generasi muda mengenai peluang karir yang tersedia.

8. Peran DPR dalam Pengawasan dan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan secara Berkala: DPR perlu menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kualitas SDM. Evaluasi berkala terhadap program-program terkait bonus demografi juga penting untuk mengetahui apakah tujuan jangka panjang tercapai atau perlu disesuaikan.

Rumuskan Kebijakan Berdasarkan Data dan Proyeksi Demografi: DPR harus mendasarkan kebijakan pada data statistik dan proyeksi demografi yang akurat, sehingga kebijakan yang diambil sesuai dengan tren perkembangan

penduduk dan kebutuhan pasar kerja.(Annisa DwiNurhafsah NajwaSilvia Shela, 2022)

Untuk mengoptimalkan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam implementasi menuju Indonesia Emas 2045 dan memanfaatkan bonus demografi, beberapa metode dapat diterapkan. Metode-metode ini akan membantu DPR dalam merumuskan kebijakan yang relevan, melakukan pengawasan, dan mendorong implementasi program yang dapat mengarah pada pencapaian tujuan jangka panjang tersebut.

Berikut adalah beberapa metode yang relevan:

1. Metode Legislasi (Legislative Method)

Deskripsi: DPR memiliki fungsi utama dalam pembuatan undang-undang. Dalam konteks bonus demografi, DPR harus merumuskan undang-undang yang mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, seperti undang-undang tentang pendidikan vokasi, pengembangan teknologi, dan ketenagakerjaan.

Implementasi: DPR dapat merancang dan mengesahkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan SDM, seperti peraturan tentang pendidikan kejuruan, pelatihan kerja, serta peraturan yang mempermudah investasi di sektor teknologi dan industri.

2. Metode Pengawasan (Oversight Method)

Deskripsi: DPR berfungsi sebagai lembaga pengawas yang memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan. Pengawasan terhadap program-program yang berkaitan dengan bonus demografi penting untuk memastikan bahwa anggaran dan program-program terkait pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan diimplementasikan dengan efektif.

Implementasi: DPR dapat melakukan pengawasan melalui mekanisme sidang, rapat dengar pendapat, atau melalui tim khusus yang

menilai progres pencapaian bonus demografi, seperti program-program untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan keterampilan tenaga kerja.(S.Suherman U.Yustiana Y. R. JIIP, 2024)

3. Metode Partisipasi Masyarakat (Participatory Method)

Deskripsi: Metode partisipatif melibatkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam merumuskan kebijakan. DPR dapat memfasilitasi dialog antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi untuk menghasilkan kebijakan yang mendukung implementasi bonus demografi.

Implementasi: Mengadakan forum publik, rapat dengar pendapat (hearing), atau konsultasi dengan stakeholders untuk memahami kebutuhan dan tantangan di lapangan, serta memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat mencakup berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat.(S.SHEs, 2022)

4. Metode Analisis Data (Data Analysis Method)

Deskripsi: DPR dapat menggunakan analisis data untuk memetakan kebutuhan dan potensi tenaga kerja di Indonesia, serta proyeksi demografis untuk jangka panjang. Berdasarkan data tersebut, DPR dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Implementasi: Menggunakan data statistik tentang tren demografi, ketenagakerjaan, dan pendidikan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja terampil dan memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja di bidang-bidang tersebut.(Dus Arifian, 2019)

5. Metode Kolaborasi Antar Lembaga (Inter-Institutional Collaboration)

Deskripsi: Kolaborasi antara DPR, pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi akan

mempercepat pencapaian tujuan bonus demografi. Dengan bekerja sama, kebijakan yang lebih holistik dan terintegrasi bisa tercipta.

Implementasi: DPR dapat mendorong pembentukan forum kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta mempercepat program pembangunan infrastruktur dan teknologi.(LSugiharto S, 2022)

6. Metode Penyuluhan dan Edukasi (Outreach and Education Method)

b. Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Memastikan Kebijakan Bonus Demografi Dilaksanakan Dengan Baik Di Tingkat Daerah

Indonesia telah memasuki era bonus demografi, yang menjadi momentum penting bagi bangsa untuk menciptakan generasi yang berdaya saing tinggi. Peran pemuda, khususnya generasi muda saat ini, menjadi sangat krusial dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045

Visi ini menggambarkan cita-cita bangsa untuk mencapai kemajuan yang signifikan, dengan menyiapkan generasi muda sebagai sumber daya manusia unggul. Generasi ini diharapkan mampu menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa melalui ide-ide, kreativitas, dan inovasi. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia, terutama generasi muda, menjadi kunci utama dalam mewujudkan impian besar Indonesia Emas 2045.

Fungsi pengawasan DPRD berjalan efektif dalam memastikan kebijakan bonus demografi dilaksanakan dengan baik di tingkat daerah dengan cara memastikan bahwa di setiap tingkat daerah masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan seperti program yang sedang berjalan saat ini yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah sebuah konsep yang memberikan kebebasan

kepada guru dan peserta didik untuk merancang dan menentukan sistem pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Kebijakan ini dapat membantu dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap menghadapi bonus demografi. Beberapa hubungan antara merdeka belajar dan bonus demografi adalah:

1. Pendidikan karakter, Merdeka belajar dapat diaplikasikan dalam pendidikan karakter multidimensi, yang merupakan langkah persiapan untuk menyambut Bonus demografi. Pendidikan karakter yang baik akan membentuk generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan.

2. Kewirausahaan, Merdeka belajar juga mendorong pengembangan potensi kewirausahaan pada mahasiswa. Hal ini penting dalam menghadapi bonus demografi, di mana generasi muda perlu memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan potensi ekonomi.

3. Peran pemerintah dan masyarakat, Untuk menghadapi bonus demografi dengan baik, diperlukan komitmen dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan serta partisipasi aktif masyarakat sebagai pelaku perubahan. Merdeka belajar dapat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mempersiapkan SDM yang siap menghadapi Bonus demografi, sedangkan masyarakat dapat mendukung upaya pemerintah dengan memberikan pergerakan sederhana seperti mengabdikan kepada masyarakat.

Bonus demografi merupakan fenomena di mana jumlah penduduk usia produktif dalam suatu negara meningkat secara signifikan. Sebagai negara yang sedang menuju Indonesia Emas 2045, bonus demografi merupakan peluang besar bagi Indonesia dalam mencapai tujuan tersebut. Namun, peluang ini hanya akan terwujud jika kita mampu mengelola sumber daya manusia dengan baik, terutama dalam sektor pendidikan. Perguruan tinggi berupaya untuk mampu meluluskan mahasiswanya

menjadi seseorang yang mampu menciptakan lapangan kerja dan bukan sebagai pencari kerja. Pendidikan adalah salah satu faktor utama dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi tantangan era bonus demografi. Pemerintah bahkan dalam hal ini telah menggiatkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), menerbitkan kartu prakerja, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Memperbanyak Bea Siswa, sehingga hal ini bisa terlihat alokasi investasi yang tinggi di bidang pendidikan, sebagai upaya atas kondisi penambahan populasi negeri ini.

(Sukmana, 2024)

c. Langkah Inovatif Yang Dilakukan DPRD Dalam Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045

Pembangunan berkelanjutan adalah agenda global yang menitikberatkan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam berbagai upaya dalam upaya mencapai kesejahteraan jangka panjang. Bagi Indonesia, pembangunan berkelanjutan memiliki relevansi strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yakni sebagai negara maju dengan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berdaya saing tinggi. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peran vital sebagai institusi yang tidak hanya berfungsi dalam legislasi, pengawasan, dan anggaran, tetapi juga dalam menggerakkan partisipasi publik secara inklusif.

Partisipasi publik dalam pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan, karena melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan akuntabilitas, legitimasi, dan relevansi kebijakan yang dihasilkan. Namun, realitas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi pembangunan berkelanjutan, kurangnya akses terhadap

informasi, dan terbatasnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah inovatif dari DPRD untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif. Inovasi ini mencakup pemanfaatan teknologi, peningkatan transparansi, dan penyediaan mekanisme konsultasi publik yang lebih efektif. Dengan pendekatan yang tepat, DPRD dapat menjadi motor penggerak yang menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga kontribusi semua pihak dapat dioptimalkan dalam mencapai visi besar Indonesia Emas 2045. Diperlukan analisis lebih lanjut mengenai strategi konkret yang dapat diimplementasikan guna memperkuat partisipasi publik dan mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa langkah inovatif yang dapat dilakukan DPRD untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045, berdasarkan kajian akademis umum, ***Langkah-Langkah Inovatif:***

1. Peningkatan Transparansi melalui Teknologi Digital, DPRD dapat memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan informasi pembangunan secara transparan, seperti portal berbasis data terbuka (open data). Hal ini meningkatkan akses masyarakat terhadap data pembangunan dan memungkinkan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan.

2. Forum Konsultasi Publik yang Berkelanjutan, Membangun forum reguler dengan kelompok masyarakat, termasuk pemuda, perempuan, dan organisasi lokal, untuk mendengar aspirasi terkait isu-isu pembangunan berkelanjutan.

3. Program Edukasi Publik tentang Pembangunan Berkelanjutan, Melibatkan akademisi, NGO, dan media untuk mengedukasi masyarakat tentang tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan peran mereka dalam mencapainya.

4. Penggunaan Alat Partisipasi Digital (E-Government Tools), Mengadopsi aplikasi atau platform berbasis teknologi untuk survei, konsultasi, atau pelaporan isu pembangunan. Ini dapat menjangkau lebih banyak orang, khususnya di daerah terpencil.

5. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Akademisi, Mengintegrasikan sektor swasta dan akademisi dalam program DPRD untuk menciptakan solusi yang berbasis inovasi dan penelitian. Inovasi memiliki peran strategis sebagai pendorong utama dalam menciptakan peluang kerja. Misalnya, dengan cara memanfaatkan potensi demografi dan perkembangan teknologi, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Kerja sama strategis antara sektor publik, swasta, serta lembaga pendidikan dan penelitian memastikan bahwa inovasi dan penelitian dilaksanakan secara terarah dan terkoordinasi. Inovasi dan penelitian turut berkontribusi dalam meningkatkan tingkat produktivitas tenaga kerja. (Satyahadewi et al., 2023).

6. Insentif untuk Partisipasi Masyarakat, Dengan Cara Menawarkan penghargaan atau insentif kepada individu atau kelompok masyarakat yang aktif dalam program pembangunan. (Lillyan et al., 2023). Indonesia mempunyai peluang besar untuk memanfaatkan sepenuhnya Manfaat bonus demografi dan kemajuan teknologi dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Hal-hal berikut memerlukan perhatian segera:

Pertama, pendidikan dan pelatihan memegang peranan krusial dalam mempersiapkan tenaga kerja untuk menghadapi perkembangan teknologi.

Landasan upaya tersebut adalah menjamin pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pendidikan inklusif

merupakan Langkah penting untuk memastikan bahwa tidak ada anggota masyarakat yang tertinggal dalam era kemajuan teknologi adalah dengan memberikan akses yang setara terhadap pendidikan, termasuk bagi mereka yang berada di daerah terpencil dan kurang mampu secara ekonomi.

Kedua, perhatian harus diberikan pada sektor-sektor yang berkembang. Mengidentifikasi bidang-bidang di mana teknologi kecerdasan buatan (AI) dapat memberikan kontribusi signifikan merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi bonus demografi. Penting untuk dipahami bahwa dampak yang ditimbulkan oleh pengenalan AI tidak akan dirasakan secara merata di seluruh sektor. Oleh karena itu, strategi yang tepat sasaran dan hati-hati sangat penting untuk mengidentifikasi industri potensial. Salah satu bidang yang menjadi perhatian utama adalah sektor manufaktur. Teknologi AI dapat diterapkan untuk mengotomatisasi proses produksi, meningkatkan efisiensi, serta mengoptimalkan kualitas produk. Sektor kesehatan juga merupakan bidang yang memiliki potensi besar. Penerapan kecerdasan buatan dalam diagnosis medis dan pengelolaan data kesehatan diharapkan dapat meningkatkan akurasi serta efisiensi dalam penyediaan layanan kesehatan. Para tenaga kesehatan, termasuk dokter dan perawat, akan mendapatkan pelatihan khusus mengenai penggunaan teknologi ini guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Sektor pendidikan berpotensi meraih manfaat signifikan dari penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI). Penggunaan AI dalam pembelajaran, pembelajaran daring, dan personalisasi kurikulum dapat meningkatkan efektivitas proses pendidikan. Para pendidik, termasuk guru dan instruktur, perlu diberikan pelatihan khusus untuk memanfaatkan alat berbasis AI dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, sektor-sektor strategis lainnya, seperti keuangan, perhotelan, dan hiburan, juga memiliki peluang besar untuk memanfaatkan teknologi AI guna meningkatkan kualitas layanan mereka. (Satyahadewi et al., 2023)



Gambar 1.1 Museum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(sumber : Mahasiswa Hukum)

Museum DPR RI terletak di Kompleks Parlemen, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Di dalam Museum DPR RI terdapat koleksi peninggalan Sejarah Indonesia seperti Ruang pameran sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, Koleksi dokumen-dokumen sejarah, Foto-foto dan lukisan tokoh-tokoh perjuang kemerdekaan, Benda-benda antik seperti meja sidang pertama DPR, dan terdapat juga Perpustakaan dengan koleksi buku sejarah dan politik. Museum DPR RI merupakan tempat yang ideal untuk mempelajari sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia.



Gambar 1.2 Kota Bandung, Jawa Barat

(Sumber : Dokumentasi Mahasiswa Hukum)

Selanjutnya Kota yang menjadi kunjungan Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Hukum Dan Ilmu sosial Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Kotabumi adalah Kota Bandung. Karena Hotel tempat kami beristirahat berdekatan dengan Alun-Alun Kota Bandung yang dimana tempat tersebut banyak di jelajahi dan menjadi spot foto bagi Mahasiswa.



Gambar 1.3 Wisata The Great Asia Afrika

(Sumber : Dokumentasi Mahasiswa Hukum)

The Great Asia Africa merupakan destinasi wisata unik yang terletak di Lembang, Bandung, menawarkan pengalaman menjelajahi beragam budaya tujuh negara di benua Asia dan Afrika. Tempat ini memadukan keindahan alam pegunungan dengan reproduksi arsitektur khas, adat istiadat, dan budaya dari berbagai negara, antara lain Indonesia, Jepang, Korea, India, Timur Tengah, dan Afrika. Yang membuat The Great Asia Africa Tour unik adalah replika bangunan dan budayanya, kostum tradisional, kuliner autentik, spot foto Instagramable, dan edukasi budaya.

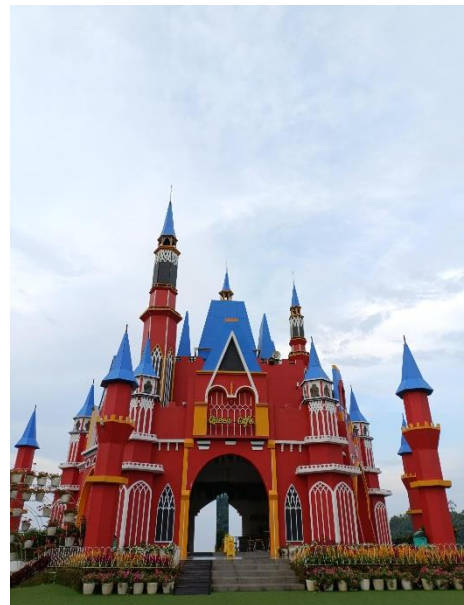
Gambar 1.4 Wisata Floating Market,



Bandung Jawa Barat

(Sumber : Dokumen Mahasiswa Hukum)

Floating Market Lembang Bandung adalah tempat wisata kuliner dan belanja terapung yang unik dan menarik karena menggunakan uang koin yang di tukarkan di tempat wisata tersebut. Di dalamnya terdapat Pasar Terapung, Restoran, Cafe dan Area Bermain, Kios oleh-oleh dan Souvenir. Terletak di Jl. Grand Hotel No. 33E, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat.



Gambar 1.5 Wisata D'Castello, Bandung Jawa Barat

(Sumber: Dokumentasi Mahasiswa Hukum)

D'Castello adalah tempat wisata kuliner dan rekreasi keluarga yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Lokasi nya berada di Jl. Surya Sumantri No. 55, Bandung, Jawa Barat. D'Castello memiliki konsep kastil Eropa dengan arsitektur megah dan indah. Harga Tiket Masuk: Rp 10.000-Rp 20.000 per orang. Harga Makanan dan minuman bervariasi.



Gambar 1.6 Foto Bersama DPL di Halaman Gedung DPR RI

(Sumber: Dokumentasi Mahasiswa Hukum)

Foto Mahasiswa dan Mahasiswi Kelompok 11 bersama Dosen Pembimbing Lapangan Field Trip Kelompok 11 Bapak Irhamuddin S.H.,M.H. di halaman Gedung DPR RI di depan Taman Patung “Ikatan” DPR RI.

SIMPULAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam implementasi menuju spirit bonus demografi Indonesia Emas 2045 sangat penting, terutama dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan peran legislatifnya, DPRD dapat berkontribusi dalam beberapa aspek berikut:

Penyusunan Kebijakan yang Mendukung Pendidikan dan Keterampilan: DPRD dapat mendorong anggaran yang lebih besar untuk sektor pendidikan, pelatihan vokasional, dan

pengembangan keterampilan untuk memastikan generasi muda siap menghadapi tantangan ekonomi global dan memiliki daya saing yang tinggi.

Mendorong Pembangunan Infrastruktur yang Merata: Infrastruktur yang baik akan memfasilitasi akses ke pendidikan, kesehatan, dan pasar kerja. DPRD dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah, yang juga mendukung pemerataan ekonomi.

Pengawasan terhadap Program Pemerintah: DPRD memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap program-program pemerintah, memastikan bahwa program yang dijalankan berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta keberlanjutan dan pemerataan manfaatnya.

Mendorong Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja: Dalam menghadapi bonus demografi, DPRD dapat berperan dalam mendorong kebijakan yang menarik investasi, baik domestik maupun asing, untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang semakin besar.

Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan: DPRD juga dapat berperan dalam memperjuangkan kebijakan terkait peningkatan akses layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial, yang merupakan aspek penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi bagian dari bonus demografi.

Dengan kontribusi yang optimal dalam bidang-bidang tersebut, DPRD dapat membantu menciptakan kondisi yang mendukung Indonesia meraih potensi maksimal dari bonus demografinya, menuju Indonesia Emas 2045.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak Irhamuddin S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing

lapangan yang telah membimbing kami selama KKN berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiyubbi D. E. Widarjono A. Amir N. Zahro F. Widiastuti T. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* (2022)
- Abunawas, R., Muthalib, AA, Nur, M., & Tambunan, R. (2023). ANALISIS PERAN DPRD DALAM PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA KENDARI. *Intelektual Indo-Fintech: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 422–437. https://doi.org/https://doi.org/10.54373/ifi_jeb.v3i2.291
- Ade. (2017). MEMPERSIAPKAN GENERASI EMAS INDONESIA TAHUN 2045 MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITAS. *Jurnal Edik Informatika Ade Jurnal Edik Informatika Penelitian Bidang Komputer Sains dan Pendidikan Informatika*, 3, 73–87.
- Annisa DwiNurhafsa Najwa Silvia Shela, H. (2022). Inovasi Pendidikan Karakter Dalam Menciptakan Generasi Emas 2045. *Jurnal Pendidikan Guru*.
- Dus Arifian, F. (2019). PERAN LEMBAGA PENCETAK TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK) DALAM MEMPERSIAPKAN GENERASI EMAS BANGSA. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 11(126–38).
- Lillyan, H., Abd., H., Masaong, K., & Abdul Haris, P. (2023). MEMPERSIAPKAN GENERASI EMAS INDONESIA 2045 MENGHADAPI BONUS DEMOGRAFI MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS KREATIFITAS. *Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia*, 9(2), 949–958. <https://doi.org/10.37905/aksara.9.2>.
- LSugiharto S, K. (2022). Gerakan Literasi dan Kearifan Lokal (Gelas Rifal) untuk Menyiapkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045. *Proceeding International Conference on Educational Leadership and Management*, 441–449.
- M. K. Ramadhani, K. (2017). Peran Pendidikan Dalam Mewujudkan Generasi Emas Indonesia Yang Bermartabat. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- S.SHEs, E. (2022). Webinar Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret. *Conference Series 5*, 75–82.
- S.Suherman U.Yustiana Y. R. JIIP, M. (2024). Peran Bimbingan dan Konseling dan Pengembangan Karir (BKPK) di Universitas dalam Mempersiapkan Karakter Bangsa Menuju Generasi Emas 2045. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.
- Satyahadewi, N., Amriani, A., & El, H. (2023). PROYEKSI PENINGKATAN PEREKONOMIAN MELALUI PEMANFAATAN BONUS DEMOGRAFI 2040. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 6(2), 715–722. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i2.7943>
- Secha, N., Ardiansyah, M., & Ahmad Luthfi Aktualita, H. (2019). Rancang Bangun Aplikasi Ready-G Sebagai Paradigma Sosial Berbasis Digital Dalam Membangun Generasi Emas Bebas Cyberbullying Emas GCyberbullying B AKTUALITA. *jurnal penelitian sosial dan keagamaan*, 9(1), 49–60.
- Sriyanti dmuhamad R et al., I. (2021). RAND DESIGN GENERASI EMAS 2045: TANTANGAN DAN PROSEPEK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK KEMAJUAN INDONESIA. *see more jurnal penelitian kebijakan pendidikan*, 14(2), 50.
- Sukmana, N. (2024). PERAN PENDIDIKAN DALAM MENYONGSONG BONUS DEMOGRAFI MENUJU INDONESIA EMAS TAHUN 2045. *Universitas Langlangbuana, Bandung*, 32(5). <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v32i5.4825>